

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Implementasi Pusat Layanan Usaha Terpatu (PLUT) Koperasi dan UMKM

Berdasarkan pada hasil penelitian Implementasi PLUT-KUMKM bagi usaha mikro di Kabupaten Kendal, maka dapat disimpulkan bahwa program PLUT KUMKM di Kabupaten Kendal di bawah tanggung jawab Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kendal telah diupayakan semaksimal mungkin. Kabupaten Kendal secara aktif menjalankan program PLUT-KUMKM sebagai bagian dari strategi nasional pengembangan UMKM.

Program PLUT-KUMKM di Kabupaten Kendal telah berjalan sejak tahun 2019 dengan fokus pada lima bidang layanan utama, yaitu produksi, pembiayaan, pemasaran, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Implementasi program ini didasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 9 Tahun 2013.

Secara umum, program ini telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung pelaku usaha mikro, terutama dalam hal fasilitasi legalitas usaha, pelatihan, dan pendampingan teknis. Namun, analisis data capaian kinerja selama periode 2022–2024 menunjukkan adanya tren penurunan pada beberapa indikator kunci. Misalnya, layanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) menurun dari 1.150 pada tahun 2022 menjadi hanya 604 pada tahun 2024. Demikian pula,

fasilitasi pembiayaan UMKM mengalami penurunan signifikan dari 243 penerima pada tahun 2022 menjadi 11 pada tahun 2024.

Di sisi lain, terdapat peningkatan pada layanan sertifikasi halal, yang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi produk. Selain itu, program pelatihan dan sosialisasi yang baru dimulai pada tahun 2024 menunjukkan potensi untuk lebih dikembangkan guna meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro.

Kesimpulan implementasi Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM bagi usaha mikro di Kabupaten Kendal berdasarkan variabel Van Meter dan Van Horn :

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Capaian 116 kegiatan selama empat tahun menunjukkan bahwa program ini relatif berhasil dan terus berlanjut walaupun belum ada standar sasaran kebijakan yang jelas karena belum memiliki produk kebijakan tingkat daerah yang secara spesifik menguraikan pedoman atau tatalaksana tentang PLUT-KUMKM di Kabupaten Kendal. Dari hasil wawancara dengan wirausaha / pelaku usaha, mereka telah merasakan langsung manfaat dari layanan PLUT-KUMKM di Kabupaten Kendal.

2) Sumber Daya

Dalam upaya pemenuhan sumber daya PLUT-KUMKM Kabupaten Kendal sudah cukup baik sesuai dengan pilar pengelolaan bisnis yaitu Pengelola, Bidang SDM, Bidang Pembiayaan, Bidang Produksi, Bidang Pemasaran, Bidang Kelembagaan, dan Admin sesuai dengan sertifikasinya masing – masing. Kemudian

untuk sumberdaya finansial sudah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal setiap tahunnya untuk keberlanjutan program - program PLUT.

3) Karakter Agen Pelaksana

Dalam proses implementasi program pemberdayaan PLUT-KUMKM bagi usaha mikro Kabupaten Kendal, karakteristik agen pelaksana sudah memiliki kualifikasi konsultan yang *service excellence* dan mempunyai jiwa pelayanan yang tinggi. sudah sangat baik dalam melayani wirausaha atau pelaku usaha sehingga wirausaha tersebut secara tidak langsung menjadi agen yang nantinya akan merekomendasikan pelayanan PLUT-KUMKM ke wirausaha – wirausaha lain yang membutuhkan pelayanan PLUT-KUMKM di Kabupaten Kendal.

4) Komunikasi

Kemudian, implementasi dalam aspek komunikasi dalam organisasi, komunikasi dengan masyarakat (pelaku usaha), maupun komunikasi antar dinas sudah berjalan dengan cukup baik dan saling mendukung satu sama lain. Implementasi program pemberdayaan PLUT-KUMKM bagi usaha mikro di Kabupaten Kendal tidak dapat dilepaskan dari interaksi tiga aspek tersebut. Aspek sosial menyentuh kebutuhan masyarakat; aspek ekonomi terkait sumber daya dan keberlanjutan; sedangkan aspek politik berperan dalam menciptakan kerangka kebijakan dan legitimasi kelembagaan. Ketiganya harus berjalan seimbang agar pusat layanan tersebut dapat berfungsi optimal sebagai pendorong pertumbuhan UMKM daerah.

5) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Dalam proses implementasi PLUT-KUMKM bagi usaha mikro di Kabupaten Kendal, kondisi sosial, politik dan ekonomi atau lingkungan kebijakan belum maksimal, karena selain lokasi gedung PLUT yang jauh dari pusat kota, fasilitas di dalamnya pun belum layak untuk mendukung pelatihan atau pendampingan pelaku usaha UMKM.

6) Disposisi Pelaksana

Program - program PLUT-KUMKM Kendal terimplementasi dengan baik, karena adanya pemahaman konsultan dan stakeholder PLUT-KUMKM yang baik serta sikap yang baik atau mendukung dalam pelaksanaan program PLUT-KUMKM ditandai dengan pencapaian persentase jumlah perizinan, aspek pemasaran dan aspek pembiayaan dari target yang ada. Keberhasilan signifikan dalam pencapaian beberapa indikator menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan tidak sekadar menjalankan perintah, tetapi benar-benar memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap tujuan besar dari pemberdayaan UMKM.

3.1.2 Faktor - Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Implementasi PLUT-KUMKM bagi Usaha Mikro di Kabupaten Kendal

Implementasi kebijakan PLUT-KUMKM di Kabupaten Kendal menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural.

1) Dalam aspek sumber daya, ketersediaan konsultan yang kompeten dan bersertifikat telah menjadi faktor pendukung utama, walaupun terdapat

keterbatasan jumlah konsultan dan belum optimalnya spesialisasi seperti konsultan IT. Merujuk pada jumlah SDM pada provinsi, seharusnya ada tambahan konsultan IT karena pelatihan sekarang sudah mengarah ke sosial media (*Tik Tok* dan *Shopee*). Namun dikarenakan ada 5 konsultan dan 1 admin di PLUT-KUMKM Kendal yang ternyata menguasai IT, sementara admin tersebut merangkap sebagai konsultan IT pada PLUT-KUMKM. Kemudian dalam struktur organisasi telah terbagi ke dalam bidang keahlian masing - masing, Kepala Pembiayaan, Kepala SDM, dan sebagainya, namun untuk implementasinya, SDM tersebut terbagi atas wilayah, bukan bidang. Sehingga setiap 1 konsultan dengan 4 - 5 kecamatan handle semua bidang. Sementara dari sisi finansial, kegiatan PLUT relatif bergantung pada dukungan dari kementerian melalui mekanisme proposal.

2) Dari aspek sosial, ekonomi, dan politik, letak geografis gedung PLUT yang jauh dari pusat kota menjadi tantangan tersendiri dalam hal aksesibilitas informasi dan layanan, terutama bagi pelaku usaha di daerah pinggiran. Namun, PLUT-KUMKM mampu memanfaatkan relasi antarlembaga serta kerja sama dengan sektor swasta untuk memperluas akses pasar. Dalam konteks ekonomi-politik, kebijakan lintas dinas serta kolaborasi antar-dinas menjadi pendekatan yang strategis, meskipun perlu penguatan koordinasi teknis di lapangan.

3) Dalam aspek komunikasi, dari semua informan wirausaha, baik yang mengetahui dan mengikuti program - program dari PLUT-KUMKM semua mendapatkan informasi pertama kali tentang PLUT-KUMKM dari teman sesama pelaku usaha. Sehingga dukungan implementasi PLUT-KUMKM Kabupaten Kendal ini adalah dari pelaku usaha yang aktif dalam mencari informasi dan

memberikan informasi tentang PLUT kepada pelaku usaha lain. Sedangkan, menurut peneliti, ini amat disayangkan karena sosialisasi sebenarnya bisa dari PLUT-KUMKM dengan taraf bertingkat dari kecamatan, ke kelurahan yang nantinya ke RT/RW sehingga bisa mendapatkan informasi pendataan yang lebih valid dan bisa menjadi dasar pengambilan keputusan untuk program - program pendampingan atau pemberdayaan selanjutnya bagi PLUT-KUMKM di Kabupaten Kendal.

4) Kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas, digitalisasi, dan perlindungan kekayaan intelektual (HAKI) masih tergolong rendah. Banyak pelaku UMKM, terutama yang berusia di atas 40 tahun, mengalami kesulitan dalam mengadopsi teknologi digital baik untuk pemasaran maupun pembukuan. Rendahnya pemahaman tentang HAKI juga menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut dari pendamping PLUT. Selain itu, perubahan *mindset* pelaku usaha, khususnya di wilayah pedesaan, menjadi tantangan tersendiri karena adanya resistensi terhadap hal-hal baru dan kecenderungan untuk mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan.

5) Namun demikian, capaian kinerja PLUT-KUMKM Kendal tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan hasil yang melampaui target dalam beberapa aspek seperti legalitas usaha dan akses pemasaran. Hal ini mencerminkan bahwa adanya disposisi atau sikap kerja yang baik dari para konsultan, serta koordinasi yang kuat dengan stakeholder lainnya, turut menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan PLUT-KUMKM Kabupaten Kendal telah diimplementasikan secara cukup efektif, namun masih membutuhkan penguatan dalam hal sumber daya, pemerataan informasi, peningkatan literasi digital, serta perubahan pola pikir pelaku UMKM sebagai bagian dari pemberdayaan yang berkelanjutan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran dari peneliti untuk implementasi PLUT-KUMKM bagi usaha mikro di Kabupaten Kendal, yaitu antara lain :

4.2.1 Implementasi Pusat Layanan Usaha Terpatu (PLUT) Koperasi dan UMKM

1) Untuk menjangkau pelaku UMKM yang belum terdaftar atau belum mendapatkan layanan PLUT, perlu dilakukan pendekatan berbasis komunitas dan pemetaan wilayah. PLUT-KUMKM dapat bekerja sama dengan pemerintah desa, BUMDes, ataupun forum UMKM local untuk melakukan pendataan dan identifikasi pelaku usaha yang belum tergabung. Selain itu, pendekatan informal seperti “Jemput Bola” melalui pelatihan keliling atau pendampingan langsung di kecamatan-kecamatan juga dapat meningkatkan partisipasi. Kegiatan ini sekaligus dapat menjadi ajang edukasi tentang pentingnya legalitas usaha, akses pembiayaan, dan strategi pemasaran berbasis digital.

2) Dalam aspek komunikasi dan penyebaran informasi, mayoritas pelaku usaha mengetahui keberadaan PLUT dari sesama pelaku usaha, bukan dari kanal resmi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan

masih belum menjangkau secara menyeluruh. Oleh karena itu, PLUT-KUMKM Kendal perlu membangun mekanisme sosialisasi yang lebih proaktif dan terstruktur, seperti melakukan sosialisasi berjenjang melalui kecamatan, kelurahan hingga RT/RW. Pemerintah juga dapat melibatkan tokoh masyarakat atau perangkat desa sebagai agen informasi. Selain itu, pemanfaatan media sosial secara profesional dan intensif juga dapat menjangkau pelaku usaha muda yang lebih akrab dengan teknologi digital.

3) Diperlukan peningkatan sarana dan prasarana fisik dari Gedung PLUT. Letak Gedung yang jauh dari pusat kota serta terbatasnya fasilitas pelatihan menjadi hambatan dalam menjangkau pelaku usaha, terutama dari wilayah pinggiran. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pembangunan pos layanan atau unit pendampingan keliling di wilayah-wilayah strategis. Selain itu, perlu adanya revitalisasi ruang pelatihan, penambahan fasilitas multimedia, serta penguatan infrastruktur digital seperti jaringan internet yang memadai.

4) Untuk mengatasi rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap legalitas, perlindungan HAKI, dan digitalisasi, PLUT-KUMKM perlu memperkuat pendekatan edukatif yang aplikatif dan disesuaikan dengan latar belakang pelaku usaha. Pelatihan sebaiknya dikemas secara praktis, berbasis simulasi, dan mempertimbangkan segmentasi usia. Untuk pelaku usaha muda, pelatihan pemasaran melalui Tiktok, Shopee, atau Instagram sangat relevan, sementara bagi pelaku usaha lebih senior, pelatihan pembukuan digital sederhana dan pengurusan

NIB bisa menjadi prioritas. Selain itu, edukasi tentang pentingnya HAKI juga perlu disampaikan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang mudah dipahami.

5) Penguatan koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kunci keberhasilan program. Koordinasi antar dinas, seperti Dinas Perdagangan, Kominfo, dan Dinas Perindustrian, perlu terus difasilitasi untuk mencegah tumpang tindih program dan memperkuat integrasi layanan. Kolaborasi dengan pihak swasta seperti *e-commerce*, Lembaga pembiayaan, dan Lembaga pelatihan, juga dapat membuka lebih banyak peluang bagi pelaku UMKM untuk berkembang.

4.2.2 Faktor - Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Implementasi PLUT-KUMKM bagi Usaha Mikro di Kabupaten Kendal

1) Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM perlu mengusulkan penambahan jumlah konsultan, terutama yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi dan digital marketing. Hal ini penting mengingat tren pemasaran saat ini sudah mengarah ke platform digital seperti TikTok, Shopee, dan media sosial lainnya. Ketersediaan konsultan IT yang mumpuni dan tidak hanya merangkap dari fungsi admin akan meningkatkan efektivitas pendampingan berbasis digitalisasi.

2) Dinas Koperasi dan PLUT-KUMKM perlu lebih aktif dalam memberikan edukasi terkait pentingnya perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Stigma bahwa HAKI tidak diperlukan bagi pelaku usaha lokal harus diluruskan melalui pendekatan yang tepat dan sistematis. Pelatihan HAKI perlu dijadwalkan

secara reguler dan melibatkan undangan terbuka serta evaluasi partisipasi agar pelaku usaha yang sudah menyatakan minat tidak merasa diabaikan.

3) Untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan, terutama di kalangan pelaku usaha usia lanjut atau yang tinggal di desa, pendekatan personal dan berbasis komunitas sangat penting. Konsultan PLUT dapat memanfaatkan pelaku usaha yang sudah berhasil sebagai role model atau mentor dalam kelompok UMKM. Pelatihan berbasis praktik langsung dan pendampingan intensif juga perlu diterapkan.

4) Mengoptimalkan strategi komunikasi berbasis komunitas dan *word of mouth*, mengingat sebagian besar pelaku UMKM mengetahui PLUT-KUMKM dari informasi antar teman. PLUT dapat membentuk duta UMKM atau relawan informasi yang bertugas menyebarkan program dan pelatihan PLUT kepada komunitas masing-masing, khususnya di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.